

PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INVESTASI DI KABUPATEN GORONTALO

Abdul Latif

IAIN Sultan Amai Gorontalo Indonesia

abdullatif1003@gmail.com

Keywords:

Infrastructure, Education, Health, Agriculture, Investment

ABSTRACT

This study aims to determine the magnitude of the influence of infrastructure development in the field of Education, Infrastructure in the Health sector and Infrastructure in the Agriculture sector on increasing investment in the form of PMA and PMDN in Gorontalo Regency.

The results of secondary data processing using multiple regression analysis where the infrastructure of Education, Health, and Agriculture simultaneously showed a significant effect where the F-count 25.848 was greater than the F-table 3.47. While partially; infrastructure in education and agriculture shows the most significant effect compared to health infrastructure as evidenced by t-test analysis, where t-count $X1 = 4.743$ and $X2 = 7.618$ is greater than t-table 1.714. Overall, the three variables show a positive and quite strong influence on increasing investment in Gorontalo Regency, this can be proven by looking at the correlation coefficient (R) of 0.895 or 89% which increases in the three independent variables will result in an increase in the dependent variable, namely investment.

The implications of this research are directed at the expectations of the local government of Gorontalo Regency in making public policies regarding the acceleration of infrastructure development and making a number of breakthroughs or innovations that are effective in attracting investors to invest in the regional infrastructure development sub-sector.

Kata Kunci:

Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Investasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pembangunan infrastruktur pada bidang Pendidikan, Infrastruktur bidang Kesehatan serta Infrastruktur bidang Pertanian terhadap peningkatan investasi baik dalam bentuk PMA maupun PMDN di Kabupaten Gorontalo.

Hasil olahan data sekunder dengan menggunakan analisa regresi berganda dimana infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian secara simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan dimana F-hitung 25,848 lebih besar daripada F-tabel 3,47. Sedangkan secara parsial; infrastruktur bidang pendidikan dan pertanian menunjukkan pengaruh yang paling signifikan dibandingkan dengan infrastruktur kesehatan yang dibuktikan dengan analisis uji t, dimana t-hitung $X1 = 4.743$ dan $X2 = 7.618$ lebih besar daripada t-tabel 1,714. Secara keseluruhan, ketiga variabel menunjukkan pengaruh yang positif dan cukup kuat terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Gorontalo, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat angka koefisien korelasi sebesar (R) sebesar 0,895 atau 89% yang peningkatan ketiga variabel bebas tersebut akan mengakibatkan kenaikan pada variabel terikat yakni investasi.

Impilikasi dari penelitian ini diarahkan pada harapan-harapan pada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengambil kebijakan publik mengenai percepatan pembangunan infrastruktur dan membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif dalam menarik investor untuk berinvestasi pada subsektor pembangunan infrastruktur daerah.

PENDAHULUAN

Pembiayaan infrastruktur oleh pemerintah merupakan perbincangan yang sangat menarik dikalangan para pakar. Diakui oleh para pakar bahwa pemerintah memang menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan infrastruktur, dimana keterbatasan dana menyebabkan tidak memungkinkan pemerintah mengandalkan metode pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Bahkan untuk infrastruktur dimana kelayakan finansial tidak mungkin dicapai seperti di daerah terpencil dan pedesaan, dana pemerintah masih belum mencukupi mengingat biaya investasi yang cukup besar. (Hermanto Dardak ; <http://www.ekorakyat.org>).

Salah satu kebijakan pengembangan infrastruktur yang saat ini paling disoroti adalah masalah kebijakan investasi, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan : infrastruktur apa yang sebaiknya segera dikembangkan oleh suatu daerah? Apa kriteria investasi yang dijadikan sebagai dasar? Siapa yang melakukan investasi? dan bagaimana pola investasi dilakukan? Kesemua pertanyaan tersebut menjadi penting di era otonomi daerah saat ini.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, ada dua paradigma baru yang dikembangkan berkait dengan kebijakan investasi infrastruktur tersebut. Pertama bahwa kebijakan investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Kedua adalah kebijakan investasi ini juga melibatkan secara intens berbagai stakeholder termasuk lembaga Legislatif Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD).

Bagi daerah yang memiliki sumber dana memadai, permasalahan justru timbul pada bagaimana mengalokasikan dana dengan baik dan tepat agar sepenuhnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bagi daerah dengan sumber dana terbatas, permasalahannya menjadi lebih rumit. Selain harus mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam kebijakan investasi, juga harus merumuskan kebijakan investasi yang mampu menstimulir atau merangsang pihak ketiga untuk dapat dan mau terlibat dalam kegiatan investasi infrastruktur ini.

Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, dengan luas wilayah kurang lebih 1.221.554 ha, yang sekarang ini meliputi 5 kabupaten, dan 1 kota masing-masing : Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 852.972 jiwa dengan tingkat pendapatan per kapita sebesar Rp. 2.513.202,-. Ditinjau dari potensi sumberdaya alam, Provinsi Gorontalo mempunyai banyak potensi yang layak untuk dikembangkan, antara lain di bidang pertanian dan peternakan. Namun demikian pengembangan sektor tersebut perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur yang diharapkan dapat membuka akses-akses ke sentra produksi pertanian yang ada didaerah.

Pembangunan di Kabupaten Gorontalo hendaknya ditujukan untuk membebaskan warga masyarakat dari berbagai belenggu yang menghambat pencapaian potensi dirinya secara hakiki. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas diri dan kualitas kehidupan warga masyarakat. Sebab akhirnya keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada hasil penilaian keadaan warga masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat sejahtera di

daerah ini sangat ditentukan oleh kinerja perekonomian, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, dan sedikit pada upaya meminimalkan ketimpangan.

Pengalokasian dana bagi sektor-sektor pembangunan masih lebih dominan kepada penyiapan infrastruktur akan menyerap investasi yang lebih besar dibandingkan pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan produksi. Hal ini berpengaruh terhadap nilai ICOR sektor sekunder yang mencapai 6,85 dibandingkan sektor primer dengan nilai ICOR lebih efisien yakni 4,99 dan sektor tersier 3,49. Kondisi ini terjadi karena salah satu prioritas pembangunan wilayah beberapa tahun terakhir bahkan kedepan nanti adalah membuka dan memperluas akses ke sentra-sentra produksi membutuhkan anggaran yang cukup besar namun dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat diukur secara ekonomis bahkan dominan pula kepada fungsi sosial.

Untuk mempermudah laju pertumbuhan investasi pada daerah-daerah yang terus berkembang seperti Kabupaten Gorontalo, dibutuhkan prasarana dan sarana penunjang yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan didalamnya; baik itu masyarakat, pemerintah daerah maupun investor domestik maupun asing. Menyikapi kondisi daerah Kabupaten Gorontalo yang telah digambarkan diatas, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi dengan mengangkat judul "***Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Gorontalo***". Penelitian ini akan difokuskan pada infrastuktur subsektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian karena ketiga subsektor tersebut merupakan subsektor pembangunan ekonomi daerah yang merupakan subsektor unggulan di kabupaten gorontalo yang membutuhkan prioritas utama dalam pembiayaan investasi.

LANDASAN TEORI

a. Pembangunan

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan.

Simon Kuznets menyatakan bahwa "*a country's economic growth as a long-term rise in capacity to supply increasingly diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional and ideological adjustments that it demands*" (Todaro, 2000:155). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000, 37).

Pembangunan adalah merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat bersangkutan. (Sanusi, 2004:8).

Pembangunan ekonomi menurut Kuncoro (2004:51) adalah proses penciptaan lingkungan oleh masyarakat yang mempengaruhi hasil-hasil indikator ekonomi seperti

kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan dan perilaku.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Apapun komponen spesifik atas “Kehidupan yang lebih baik” itu, bertolak dari tiga nilai pokok di atas, proses pembangunan disemua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok; seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara/bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai kemanusiaan mereka. (Todaro dan Smith, 2004:28).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai unit ekonomi (*Economic entity*) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Menurut Mudrajad (2004:46) ada tiga unsur dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana di tempat daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antar keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan untuk pembangunan daerah misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya; (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda.

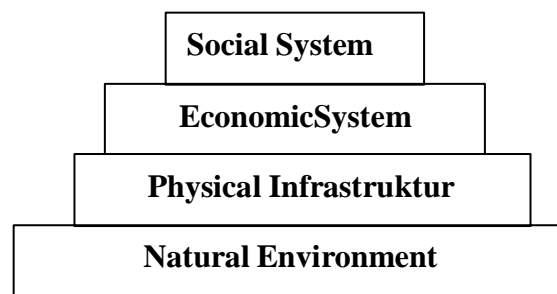
Terdapat dua perspektif pembangunan perekonomian: responsif terhadap kebutuhan eksternal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Blakely, 1999:81), responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktek perencanaan yang banyak dianut. Responsif terhadap kebutuhan eksternal merupakan praktek perencanaan yang

banyak dianut. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal merupakan pendekatan baru. Kedua jenis perspektif pembangunan tersebut bermuara pada tahapan tipologi empat orientasi perencanaan yang berbeda, yaitu : *recruitmen planning*, *impact planning*, *kontinjensi planning* dan *strategic planning*.

b. Infrastruktur

Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1988; Fadel Muhammad 2004).

Sebagai salah satu konsep pola pikir, di bawah ini diilustrasikan dengan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur terhadap sistem lainnya. Pada diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran yang didukung oleh sistem ekonomi.



Gambar 1, Diagram hubungan sistem sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan alam (Grigg, 1988 dalam Fadel Muhammad 2004).

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua sistem yang ada, sehingga keberadaannya perlu dijaga serta dilakukan evaluasi dampak lingkungan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang berfungsi akan memberikan dampak negatif yang besar bagi manusia, dan lingkungan termasuk makhluk hidup lainnya. Berhubung infrastruktur berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti secara jelas bagi penentu arah kebijakan, karena peranannya yang sangat penting dalam pengembangan wilayah baik makro, regional maupun lokal.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur fisik merupakan social overhead capital, yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai.

Dalam teori ekonomi, infrastruktur fisik termasuk dalam kategori public goods, yaitu suatu barang yang dimanfaatkan secara bersama. Public goods pada umumnya mahal, sehingga perlu dibiayai secara kolektif. Oleh sebab itu penyelenggaraan infrastruktur fisik berada pada otoritas publik yang dalam hal ini pemerintah dengan pembiayaan secara tidak

langsung dari masyarakat terutama melalui pajak. Namun demikian, pemerintah tidak melaksanakan sendiri secara langsung pembangunan infrastruktur keseluruhan sehingga peran swasta sebagai penyedia jasa sangat diperlukan.

Perdebatan mengenai prasarana telah bergeser dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Pada mulanya diyakini bahwa prasarana harus mendahului pembangunan. Para penanam modal tidak akan tertarik pada suatu negara jika tidak terdapat tenaga listrik, atau fasilitas pengangkutan, atau buruh ahli. Jadi prioritas pertama ialah menciptakan prasarana, yang sesudahnya investasi-investasi disektor lain akan mengalir. Hasil ini tidak selalu berbentuk material, banyak contoh adanya fasilitas yang dibangun lebih dahulu karena kebutuhan yang tidak menarik pemakai.

Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya, karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta.

Infrastruktur juga dapat dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan adanya pengurangan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan air bersih, berangkat bekerja, menjual barang ke pasar dan sebagainya. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.

Infrastruktur sering dikatakan sebagai *social overhead capital* yang meliputi:*those services without which primary, secondary and tertiary production activities cannot function. In its wider sense it includes all public health to transportation, communication, power and water supply, as well as such agricultural, overhead capital as irrigation and drainage systems* (Hirschman, 1998).

Menurut Arthur Lewis, (1994;114) Prasarana (*Infrastructure*) bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jika investasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrik dan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atas fasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karena bisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh dana untuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkir karena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuat tetap.

Kedua penyamarataan ini tidak benar, salah satu membiarkan prasarana dibelakang kebutuhan; tetapi kelebihan prasarana tidak memiliki kekuatan untuk menarik investasi. Disini seperti juga disektor lain, *demand* dan *supply* harus tetap selaras. (Arthur Lewis, 1994;115).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah biasanya memperhatikan lingkungan fisik, terutama infrastruktur yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan industri. Sektor swasta biasanya memiliki keinginan-keinginan, baik yang bersifat khusus maupun umum dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk lingkungan fisik ini bisa dibuat seragam. Dengan kata lain pemerintah daerah bisa menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk memenuhi keinginan dunia usaha atau industri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi untuk investasi sektor swasta adalah daya tarik (*attraction*) atau *amenity* dari suatu daerah atau suatu kota. Bentuk daya tarik *amenity* ini sering disebut kualitas hidup. Ini bisa berupa fasilitas hiburan (bioskop, obyek wisata, dan lain-lain), pendidikan, perumahan, dan tempat belanja. Dunia usaha atau bisnis menganggap "*livability*" (yang enak di diami) sebagai suatu faktor lokasional yang penting. Dalam praktik orientasi lokasional dari para industriawan dapat digolongkan

menjadi dua: pertama, berorientasi pada minimalisasi biaya transport; kedua, berorientasi pada penurunan biaya produksi. (Kuncoro, 2004:51).

The World Bank membagi infrastruktur menjadi (The World Bank, 1994):

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase), dan sektor transportasi (jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Pengadaan infrastruktur merupakan hasil kekuatan penawaran dan permintaan, ditambah dari kebijakan publik (Canning, 1999). Kebijakan publik memainkan peran yang besar terutama karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga pada pengadaan infrastruktur. Namun peningkatan pengadaan infrastruktur terhadap pendapatan tidak dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas pendapatan dari permintaan (*income elasticity of demand*) kecuali biaya infrastruktur sama di semua negara. The World Bank menunjukkan biaya pembangunan jalan di negara berpendapatan menengah kurang lebih 2/3 dari negara kaya dan negara miskin, hal ini menunjukkan bahwa hubungan Gross Domestic Product/GDP per kapita dengan infrastruktur merupakan hasil interaksi yang kompleks lebih dari sekedar penawaran dan permintaan.

c. Investasi

Dalam konteks makro ekonomi, Vekie A. Rimate, (2004:2) memberikan pengertian investasi adalah kegiatan pembiayaan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, kegiatan pembangunan rumah, pembelian mesin/peralatan, pembangunan pabrik serta penambahan inventori suatu perusahaan termasuk dalam pengertian investasi.

Kindleberger (1996:354) mendefinisikan investasi asing langsung sebagai setiap arus pinjaman, atau pembelian hak pemilikan dalam suatu perusahaan asing yang sebagian besar dimiliki oleh penduduk negara penanam modal. Porsi pemilikan tersebut untuk masing-masing negara berbeda, misalnya di USA pemilikan 10 % atas perusahaan oleh asing dapat dikatakan sebagai investasi asing langsung.

Summers dan Heston (1991) serta Pritchett (1996) menyatakan bahwa investasi akan menghasilkan efektivitas produktivitas infrastruktur yang berbeda di setiap negara. Ini disebabkan perbedaan tingkat efisiensi sektor publik dan nilai investasi dalam pembangunan infrastruktur. Hulten (1996) menyatakan manajemen dan penggunaan yang efisien dari infrastruktur jauh lebih penting daripada kuantitas sehingga dalam perhitungannya sebaiknya memasukkan unsur kualitas dan efisiensi penggunaan.

Penggunaan ukuran fisik infrastruktur dalam model lebih baik dibandingkan dengan penggunaan besarnya investasi pada infrastruktur, karena dapat mengurangi pengaruh biaya investasi per satuan unit yang berbeda-beda untuk setiap daerah akibat adanya perbedaan tingkat efisiensi penggunaan dana. Summers dan Heston (1991) serta Pritchett (1996) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai tingkat efektivitas yang berbeda dalam pengadaan infrastruktur yang disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat efisiensi pada sektor publik dan biaya pengadaan infrastruktur itu (Canning, 1998). Di Indonesia, ini terlihat dari perbedaan harga untuk jenis pekerjaan yang sama di daerah yang berbeda karena letak geografis, kemudahan dalam pencapaian wilayah jarak ke sumber material dan sebagainya. Meskipun demikian, ukuran fisik infrastruktur tidak dapat mengoreksi secara penuh kualitas infrastruktur. Huken (1996) berargumentasi bahwa

manajemen dan penggunaan yang efisien dari infrastruktur jauh lebih penting dari pada kuantitasnya (Canning, 1998).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud, berupa data rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo dan data besarnya investasi yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, serta BAPPEDA Kabupaten Gorontalo.

Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode dan sumber data sebagai berikut ;

- a. Data Primer, dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :
 - Observasi, merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti pada obyek/daerah penelitian tentang pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian
 - Dokumentasi, pengumpulan data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, laporan kegiatan, film, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.
- b. Data sekunder berupa data kualitatif tentang pambangunan infrastruktur dibidang . Data sekunder ini dikumpulkan dari publikasi maupun dokumentasi berbagai instansi/lembaga terkait seperti:
 - a) Badan Pusat Statistik (BPS)
 - b) Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
 - c) Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo
 - d) Bank Indonesia (Data Ekspor Nasional)
 - e) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Gorontalo
 - f) Publikasi-publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang diterbitkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi Profesi dan lain-lain.

Dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*) atau *explanatory variable*. (Supranto 2005:36).

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kuatnya tingkat hubungan linear antara dua variabel. Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi simbol r_{xy} atau r saja. Nilai ini letaknya antara -1 dan 1, nilai $r = 1$, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai $r = 0$, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negatif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y.

Regresi linear yang menghubungkan X dan Y disebut garis regresi linear sederhana (*simple linear regression*), apabila hubungan tersebut meliputi lebih dari dua variabel, disebut regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Inti persoalan dari

analisis regresi adalah memperkirakan dan meramalkan nilai Y apabila variabel X sudah diketahui nilainya.

Hubungan variabel pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Gorontalo diformulasikan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program *SPSS for windows* versi 12 sebagai berikut :

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \varepsilon_1$$

Dimana :

Y	= Investasi
X ₁	= Pembangunan Infrastruktur sektor Pendidikan
X ₂	= Pembangunan Infrastruktur sektor Kesehatan
X ₃	= Pembangunan Infrastruktur sektor Pertanian
β ₀	= Konstanta
β ₁ β ₂ β ₃	= Koefisien regresi
ε ₁	= Variabel lain yang tidak diteliti

Dalam suatu analisis regresi berganda, untuk mengetahui tingkat signifikansi dari suatu koefisien regresi dapat dilakukan dengan uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk melihat apakah setiap variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, sedang uji F digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kemudian pengujian hipotesis koefisien regresi (β) parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Merumuskan hipotesis.
 - H₀ : β₁ = 0 (Pembangunan Infrastruktur Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Investasi)
 - H₀: β₁ ≠ 0 (Pembangunan Infrastruktur Pendidikan berpengaruh terhadap Investasi)
 - H₀ : β₂ = 0 (Pembangunan Infrastruktur Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Investasi)
 - H₀: β₂ ≠ 0 (Pembangunan Infrastruktur Kesehatan berpengaruh terhadap Investasi)
 - H₀ : β₃ = 0 (Pembangunan Infrastruktur Pertanian tidak berpengaruh terhadap Investasi)
 - H₀: β₃ ≠ 0 (Pembangunan Infrastruktur Pertanian berpengaruh terhadap Investasi)
- 2) Menentukan Level Of Significant (LOS) pada α = 0,01 atau α = 0,05
- 3) Menentukan nilai t hitung

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta}{\frac{S\beta}{Se}}$$

$$S\beta = \frac{\beta}{\sqrt{\Sigma(X^2) - (\Sigma X)^2 / n}}$$

$$Se = \sqrt{\frac{\Sigma Y^2 - \alpha \Sigma Y - \beta \Sigma XY}{n - 2}}$$

- 4) Membuat keputusan terhadap hipotesis : dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel
Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel} α/2 (n-k) maka H₀ di terima.

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel} \alpha/2$ (n-k) maka H_0 di tolak.

- 5) Menarik kesimpulan berdasarkan keputusan yang diambil.

Kemudian akan dihitung pula besarnya koefisien determinasi (R^2) dengan rumus :

$$R^2 = \frac{\alpha \sum Y + \beta \sum XY - n(Y)^2}{\sum Y^2 - n(Y)^2}$$

Kemudian pengujian hipotesis koefisien regresi (β) secara simultan atau serentak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (Pembangunan Infrastruktur sektor Pendidikan, sektor Kesehatan dan sektor Pertanian tidak berpengaruh terhadap Investasi)

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ (Pembangunan Infrastruktur sektor Pendidikan, sektor Kesehatan dan sektor Pertanian berpengaruh terhadap Investasi)

- 2) Menentukan Level Of Significant (LOS) pada $\alpha = 0,01$ atau $\alpha = 0,05$

- 3) Menentukan F hitung

$$F = \frac{(n - k - 1) R^2_{yx}}{K(1 - R^2_{yx})}$$

- 4) Membuat keputusan terhadap hipotesis : dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 di terima.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 di tolak.

- 5) Menarik kesimpulan berdasarkan keputusan diambil.

Kemudian akan dihitung pula besarnya koefisien determinasi (R^2) dengan rumus :

$$R^2 = \frac{\alpha \sum Y + \beta \sum XY - n(Y)^2}{\sum Y^2 - n(Y)^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Pengalokasian dana bagi sektor-sektor pembangunan yang masih lebih dominan kepada penyiapan infrastruktur akan menyerap investasi yang lebih besar dibandingkan pada kegiatan

yang berkaitan langsung dengan peningkatan produksi. Hal ini berpengaruh terhadap nilai ICOR (*incremental capital output ratio*) sektor sekunder yang mencapai 6,85% dibandingkan sektor primer dengan nilai ICOR lebih efisien yakni 4,99% dan sektor tersier 3,49%. Kondisi ini terjadi karena salah satu prioritas pembangunan wilayah beberapa tahun terakhir bahkan kedepan nanti adalah membuka dan memperluas akses ke sentra-sentra produksi membutuhkan anggaran yang cukup besar namun dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat diukur secara ekonomis bahkan dominan pula kepada fungsi sosial.

Dengan adanya berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan diberbagai bidang, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan ICOR (*incremental capital*

output ratio) diperkirakan mengalami perbaikan. Dalam tahun 2005 diperkirakan sebesar 4,52 hingga menurun menjadi 3,98% pada tahun 2010.

Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi, untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp. 1.984.426.401.112,- atau rata-rata Rp. 396.885.280.222,- setiap tahunnya. Meningkatnya peranan sektor perbankan di bidang investasi diharapkan akan dapat mengurangi beban pemerintah utamanya untuk memudahkan kredit produksi kepada masyarakat, hingga dengan demikian, perbankan tidak hanya tumbuh dan besar karena tabungan masyarakat tetapi sebaliknya turut berperan pula dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 Kebutuhan Investasi Kabupaten Gorontalo 2005-2010

Indikator	Target Jangka Menengah (miliar rupiah)			
	2007	2008	2009	2010
PDRB Harga Berlaku Tahun Dasar 2000 (000)	1.302.431.061	1.393.340.749	1.491.431.937	1.599.560.753
I C O R	4,52	4,21	4,21	4,21
Pertumbuhan Ekonomi	84.522.831	90.909.688	98.091.188	108.128.815
Prosentase (%)	6,94	6,98	7,04	7,25
Investasi	382.043.196.852	382.729.786.771	412.963.904.620	455.222.313.269

Sumber : RPJM Kabupaten Gorontalo tahun 2005

Perkembangan Realisasi Investasi Serta Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian

Kerangka acuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan serta pertanian dalam rangka meningkatkan daya tarik masuknya arus modal di Kabupaten Gorontalo dapat kita ketahui apabila terdapat data atau dokumen yang mendukung keputusan investasi yang dapat diambil pihak pemerintah daerah dalam membuat kebijakan secara umum tentang upaya peningkatan penanaman modal domestik maupun asing.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengaruh antara pembangunan infrastruktur pada sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Pertanian terhadap peningkatan masuknya investasi di Kabupaten Gorontalo, maka dibawah ini disajikan data mengenai perkembangan investasi yang telah terealisasi dalam bentuk proyek PMA dan PMDN yang disajikan dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi Investasi Serta Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Tahun 2002-2007 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pendidikan (Rp)	Kesehatan (Rp)	Pertanian (Rp)	Realisasi Investasi (Rp)
1	2	3	4	5

2002	2,564,000,000	1,145,000,000	4,449,000,000	595,037,515,000
2003	2,889,000,000	1,980,000,000	3,420,000,000	631,037,515,000
2004	4,460,000,000	1,987,755,000	1,919,195,000	631,037,515,000
2005	6,155,000,000	2,114,530,000	2,162,970,000	639,420,000,000
2006	16,392,825,000	8,434,586,485	1,180,000,000	639,420,000,000
2007	24,352,000,000	9,321,275,720	1,445,000,000	640,923,000,000
Rata-Rata	9,041,470,833	3,971,357,868	2,429,360,833	629,479,257,500

Sumber : Data Diolah

b. Pembahasan

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Sektor Pendidikan, Kesehatan, serta Sektor Pertanian Terhadap Peningkatan Investasi

Hasil olahan data dalam lampiran 1 dengan menggunakan analisa regresi berganda dengan bantuan olah data komputer dengan program SPSS, dimana Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Pertanian sebagai variabel independen atau variabel bebas dan Investasi sebagai variabel dependen atau variabel terikat, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Y	=	1,232	+	0,687	X ₁	+	0,096	X ₂	+	1,153	X ₃ **
SE	=	(0,135)		(0,145)		(0,117)		(0,151)			
t _{hitung}	=	9,161		4,743		0,816		7,618			
R ²	=	0,795				F _{hitung}	=	25,848			
Significant (α= 0,05) **											

Dimana :

Y = Investasi
X₁ = Pendidikan
X₂ = Kesehatan
X₃ = Pertanian

Berdasarkan persamaan diatas, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji hipotesis koefisien regresi variabel X1, X2, X3:

1. Uji Hipotesis menyangkut koefisien regresi sektor Pendidikan (β_1) adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil analisis diatas menunjukkan t_{hitung} untuk X₁ sebesar $4.743 > t_{tabel}$ sebesar 1,714 pada $\alpha = 0,05$ dan df (derajat kebebasan) = 2. jadi dapat disimpulkan bahwa sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan investasi pada taraf signifiikasi $\alpha = 0,05$. persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X₁ dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa pembangunan infrastruktur bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap peningkatan investasi. Nilai koefisien β_1 sebesar 0.687 artinya setiap kenaikan pada bidang pendidikan sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan investasi sebesar

6,87%, hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh X_1 terhadap Y signifikan pada ($\alpha = 0,05$).

2. Uji Hipotesis koefisien regresi pembangunan infrastruktur bidang kesehatan (β_2) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dengan $\alpha = 0,05$. Hasil analisis menunjukkan bahwa angka $t_{hitung} = 0.816$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,714$. hal ini berarti bahwa pengaruh pembangunan pada sektor kesehatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan investasi.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2010. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo kedepannya untuk bisa memberikan perhatian terhadap peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam meningkatkan fasilitas/infrastruktur kesehatan baik dalam bentuk penyertaan modal asing maupun pembiayaan yang berasal modal dalam negeri.

3. Uji Hipotesis menyangkut koefisien regresi pembangunan infrastruktur pada sektor Pertanian (β_3) adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil analisis diatas menunjukkan t_{hitung} untuk X_3 sebesar $7,618 > t_{tabel}=1,714$ pada $\alpha = 0,05$ dan df (derajat kebebasan) = 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan investasi pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X_3 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan investasi. Nilai koefisien β_3 sebesar 1.153 artinya setiap kenaikan pada bidang pendidikan sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan investasi sebesar 11,53 %. hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh X_3 terhadap Y sangat signifikan ($\alpha = 0,05$).

Hasil analisis diatas memperkuat posisi Kabupaten Gorontalo akan potensi dan peluang investasi yang dimiliki pada sektor pertanian dalam hubungannya dengan keinginan investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Gorontalo

4. Uji hipotesis koefisien regresi secara keseluruhan (simultan) adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hasil analisis menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $25,848 >$ lebih besar dari pada F_{tabel} sebesar 3,47. jadi pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 secara keseluruhan (simultan) terhadap Y sangat signifikan. Artinya terdapat pengaruh yang kuat antara pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Gorontalo.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien determinasi $R^2 = 0,795$, angka ini berarti bahwa kenaikan dan penurunan tingkat investasi sebesar 79,5% dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor pertanian, sedangkan sisanya sebesar 20,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam analisis dalam model regresi.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. secara keseluruhan (simultan) terdapat pengaruh yang positif antara variabel X1 (infrastruktur pendidikan), X2 (infrastruktur kesehatan), dan X3 (infrastruktur pertanian), hal ini dapat kita lihat dari nilai probabilitas uji F, dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$. dan secara parsial variabel pembangunan infrastruktur pada sektor pendidikan dan sektor pertanian menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat investasi dibandingkan dengan variabel lainnya yakni kesehatan. Ini dibuktikan dengan uji hipotesis t , dimana t -hitung X1 dan X3 $> t$ -tabel.
2. Seluruh variabel bebas yakni pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang kesehatan dan infrastruktur bidang pertanian berkorelasi positif dan sangat kuat dengan variabel tingkat investasi karena nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,892 yang mendekati 1. dengan kata lain jika pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang kesehatan dan infrastruktur bidang pertanian meningkat akan mengakibatkan tingkat investasi juga turut meningkat.
3. Pengaruh perubahan variabel bebas yakni pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang kesehatan dan infrastruktur bidang pertanian terhadap peningkatan investasi daerah di Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebesar 79,5%, karena nilai R^2 sebesar 0,795.

b. Implikasi

1. Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo kedepan adalah bagaimana menciptakan kebijakan investasi dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan iklim investasi memerlukan kemampuan manajerial dalam menjaga iklim tetap kondusif. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan dalam menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah sebagai bagian dari koordinasi internal; kemampuan 'cepat tanggap' terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat; kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang didanai dari investasi secara tepat waktu; menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif menarik investor.
2. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menarik investor pada sektor dan subsektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan adalah peningkatan bidang pelayanan. Pelayanan dalam hal apapun, terutama yang menyangkut perijinan, fasilitas insentif, dan berbagai kemudahan-kemudahan lain. Namun tetap, hal tersebut jangan sampai merugikan dan memberikan dampak balik yang buruk. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah konsep pelayanan satu atap (*one stop services*). Tujuannya adalah agar pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan kepada investor dengan cepat, sehingga rentang waktu untuk mengurus perijinan tidak lama dan berbelit-belit. Tetapi kenyataannya, hal tersebut tidak cukup memberikan pengaruh yang signifikan, sebab pungutan liar tetap ada walaupun sistem pelayanannya sudah diubah.
3. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi langsung terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses

peningkatan komponen ekspor barang ataupun jasa unggulan yang dimiliki oleh pmda dan peningkatan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jayus, Jaja; 20 Maret 2006, Paket Kebijakan Investasi Dongkrak Investasi, Bandung, Pikiran Rakyat.
- Aziz, I. J., Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 1994.
- Canning D, Infrastructure's Contribution to Aggregate Output, The World Bank, Policy Research Working Paper No. 2246.
- Dardak, Hermanto., 2004 "Percepatan Pembangunan Infrastruktur", <http://www.ekorakyat.org>.
- Hasudungan, 2007, Pengaruh PDRB perkapita, infrastruktur jalan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banggai, tesis UNSRAT, Manado.
- Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
- Lewis W. Arthur, 1994, Perencanaan Pembangunan, Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Majidi, N. 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah. Prisma. LP3ES. Vol. 3. Hal : 3-22.
- Kuncoro, Mudrajad; 2000, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Osborne, David and Ted Gabler; 1996, Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi), diterjemahkan oleh Abdul Rosyid, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo
- Santoso, Idwan., Dr. Ir., 2005. "Workshop Kebijakan Investasi Infrastruktur Bagi *Local Government*", Jurnal Ekonomi Rakyat, 2005
- Sanuzi Bachrawi, 2004, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Cetakan pertama, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Samosir, P. Agunan dan Wibowo Tri, 2004. Analisis Efektifitas Pemberian Insentif Fiskal (Studi Kasus Kapet Pare-Pare), Artikel Kajian Ekonomi dan Keuangan vol.8 no. 1
- Strum, J.E, Kuper G.H and De Haan, J., Modelling Government Investment and Economic Growth on A Macro Level: A Review. CCSO Series No. 29.
- Todaro and Smith, 2004, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jilid Satu, Penerbit PT. Gelora Aksara, Jakarta
- Toha, Miftah 2002. Reformasi Birokrasi Indonesia, disampaikan dalam Seminar Good Governance di Bappenas, tgl 24 Oktober 2002.
- Vekie A. Rimate, 2004, Model Investasi Sulawesi Utara, Kerjasama Bank Indonesia Dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.